

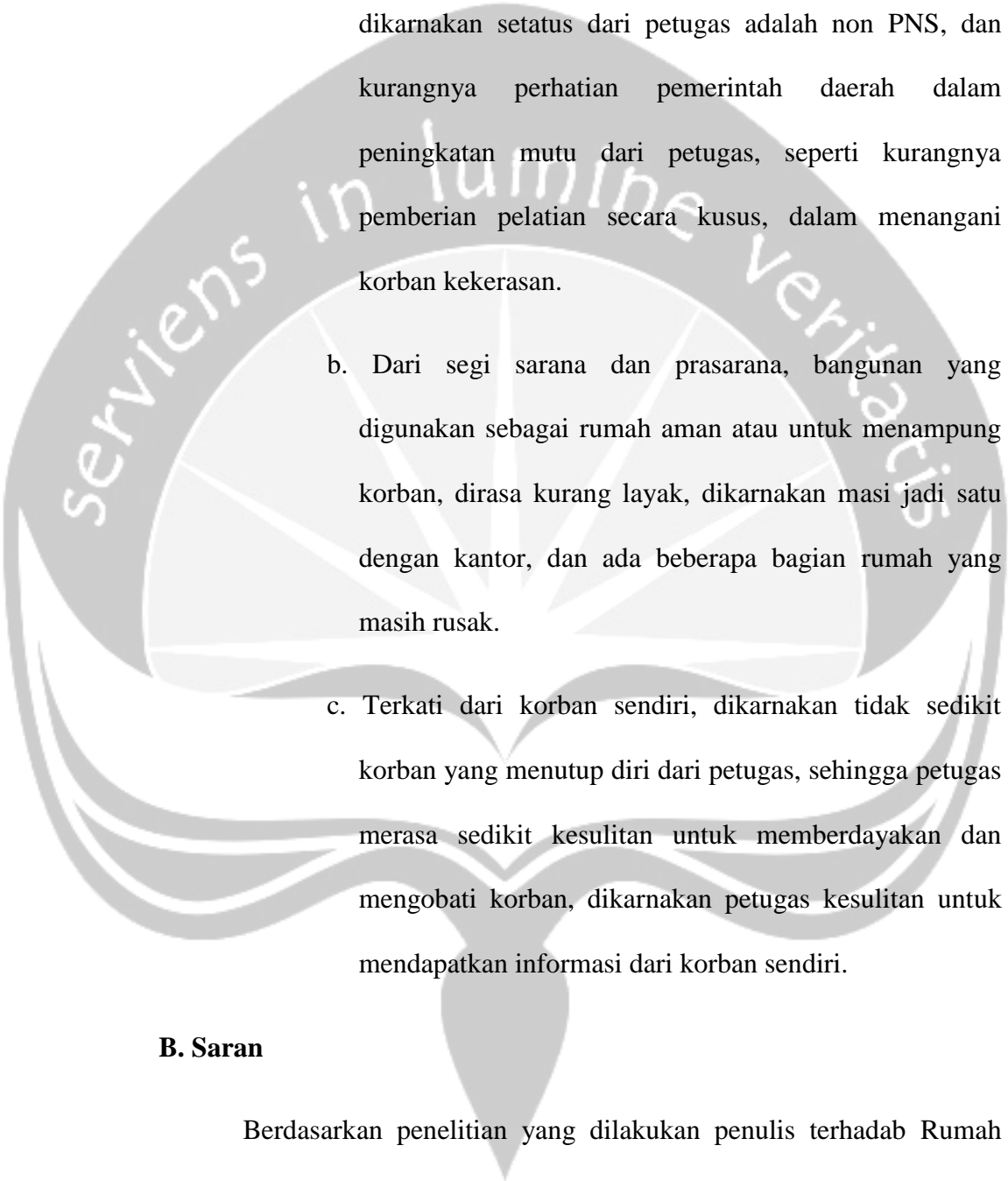
BAB III

PENUTUP

A. kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab diatas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah sebagai berikut.

1. Peran rumah aman (safe house) pemerintah kabupaten sleman sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, terbukti dari apa yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 j.o Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan PERDA Kabupaten Sleman Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, sudah dapat di implementasikan atau sudah dapat direalisasikan dengan benar, terlihat dari sudah adanya perhatian khusus terhadap korban dan sudah didirikan rumah aman, yang berfungsi dalam memberikan perlindungan.
2. Dalam menjalankan fungsinya rumah aman mengalami beberapa kendala, sehingga sedikit mengurangi efektifitas dari rumah aman, dalam memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual. Kendala-kendala yang terjadi yaitu :

- 
- a. Dari segi SDM lebihnya jam kerja yang di alami oleh petugas, ditambah lagi gaji yang dirasa minim, dikarnakan setatus dari petugas adalah non PNS, dan kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam peningkatan mutu dari petugas, seperti kurangnya pemberian pelatian secara kusus, dalam menangani korban kekerasan.
 - b. Dari segi sarana dan prasarana, bangunan yang digunakan sebagai rumah aman atau untuk menampung korban, dirasa kurang layak, dikarnakan masi jadi satu dengan kantor, dan ada beberapa bagian rumah yang masih rusak.
 - c. Terkati dari korban sendiri, dikarnakan tidak sedikit korban yang menutup diri dari petugas, sehingga petugas merasa sedikit kesulitan untuk memberdayakan dan mengobati korban, dikarnakan petugas kesulitan untuk mendapatkan informasi dari korban sendiri.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis terhadap Rumah Aman Kabupaten Seleman, sudah sesua dengan aturan atau undang-undang, akan tetapi seiring berjalanya waktu timbullah kendala atau

permasalahan. Sehingga penulis mengajukan beberapa saran, saran tersebut merupakan :

1. Peran petugas pengurus rumah aman sangat penting, petugas lah yang mendampingi korban selama menjalani rehabilitasi, sehingga penambahan petugas pengelola rumah aman dirasa penting, sehingga setiap petugas dapat bekerja sesuai porsi jam kerja normal, dan meringankan beban pekerjaan petugas yang dirasa cukup berat.
2. Dinilai kemampuan petugas pengelola rumah aman kurang memadai, sehingga pemerintah daerah harus memberikan pelatihan secara kusus tidak hanya diberikan kepada petugas yang berstatus sebagai PNS saja, melainkan petugas yang non PNS pun juga harus diberikan pelatihan secara kusus.
3. Penyediaan hunian yang lebih layak harus dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten sleman, setidaknya hal yang paling minimal adalah, melakukan beberapa perbaikan hunian yang dijadikan tempat rehabilitasi atau melakukan pemisahan antara rumah rehabilitasi dengan kantor UPT, agar menimbulkan rasa aman atau kerahasiaan yang berlebih kepada korban.

Daftar Pustaka

Buku

Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta.

J.E. Sahetapy, 1995, *Bungai Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung.

Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Raharjo Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Singarimbun Masri dan Sofyan Efendi, 1989, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta:

Surachman Winarno, 1990, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, Tarsito, Bandung;

Koentjaraningrat, 1985, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta;

Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta;

Arif Gosita, *Masalah perlindungan Anak*, Jakarta : Sinar Grafika, 1992

Ter Haar dalam Syafiyudin Sastrawujaya, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1977

Soejono Sukanto, *Kriminologi, Pengantar Sebab-sebab kejahatan*, Politea, Bandung, 1987.

Jurnal dan hasil penelitian

Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/No. I/1998

Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2018
 “Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik Populisme”

Emy Rosnawati, *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga*, JURNAL KOSMIK HUKUM Vol. 18 No. 1 Januari 2018

Data elektronik

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *15 Bentuk Kekerasan Seksual, Sebuah Pengenalan*, diunduh dari
https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf

Tingkat Kasus Kejahatan Seksual di Sleman Fluktuatif,
<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2018/11/19/512/953567/tingkat-kasus-kejahatan-seksual-di-sleman-fluktuatif>

<https://kbbi.web.id/anak>

http://www.masibied.com/search/pengertian-arti-kata-penafsiran-menurut-para-ahli#_ftn2

https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_dalam_rumah_tangga

